

Pergolakan Politik Islam

Pemikiran dan sekaligus praktek politik Islam terus bergulir mewarnai sejarah umat Islam. Namun, selalu saja diwarnai konflik di antara umat Islam itu sendiri. Apa latar belakang konflik tersebut? Bagaimana pula pemecahannya? Berikut wawancara RISALAH dengan Dr. Azyumardi Azra, lulusan Departemen Sejarah, Columbia University, AS. yang kini mengajar di Pasca-Sarjana IAIN Jakarta selain sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal *Studia Islamika*, Direktur Pusat Kajian Islam, dan sebagai Visiting Fellow pada Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford University.

Bapak sering menggunakan istilah pergolakan politik Islam, apakah maksudnya?

Pergolakan politik itu bisa kita pahami pada dua tingkatan, pertama pada tingkatan teologis dan yang kedua pada tingkatan historis. Pada level teologis, ajaran Islam itu *ambiguous* (samar/dwiarti—*red*) mengenai bagaimana seharusnya politik itu diperlakukan. Pada satu pihak, politik itu dipandang sebagai bagian integral dalam Islam. Antara *din* dengan *siyasah* itu tidak ada pemisahan tapi merupakan satu kesatuan. Sedangkan pada lain pihak, sifat *din* itu suci dan bersifat Ilahiyah.

Sementara politik itu bersifat *profan* (duniawi—*red*) dan hakikat dari politik itu sendiri adalah merebut, mempertahankan, dan melanggengkan kekuasaan sehingga politik itu melibatkan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan agama. Maka politik itu cenderung di jauhi, karena akan bisa menodai kesucian dari agama itu sendiri. Itu yang disebut dengan *ketegangan teologis*: Yang kedua adalah *ketegangan pada tingkat historis*. Ketegangan ini terjadi karena Islam juga Nabi tidak memberikan pedoman yang detail, yang rinci mengenai hubungan politik dengan agama. Sehingga ketika Nabi meninggal, sudah langsung terjadi krisis politik yaitu krisis suksesi diantara sahabat.

Kaum Muhajirin dan Anshar berebut klaim mengenai siapa yang harus menggantikan Nabi. Ketegangan itu terus berlanjut sampai sekarang. Menjadi persoalan pula dalam menentukan bagaimana



sebetulnya bentuk negara Islam? Yang mana negara Islam itu? Itulah yang selalu menjadi pertanyaan.

Apakah politik Islam itu dapat disebut juga sebagai ijtihad?

Konsepsinya mungkin ya. Sebab dalam al-Qur'an dan Hadits ada dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum mengenai bagaimana seharusnya politik Islam itu, seperti ada ayat yang menyebutkan "*wa amruhum syura bainahum*" (musyawarah). Syura itu satu prinsip politik. Bagaimana implementasi syura itu dalam bentuk kelembagaan dan proses politik Islam. Kalau itu dirumuskan, maka itu menjadi ijtihad politik. Apakah syura itu sama dengan demokrasi? Kalau itu ya, demokrasi yang mana? Apakah demokrasi yang liberal seperti Amerika atau demokrasi Pancasila seperti Indonesia? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Jadi politik Islam itu bisa berubah-ubah?

Bisa. Karena prinsip yang diterangkan al-Qur'an dan Hadits itu bersifat global, maka sangat mungkin—dan memang harus—terjadi penyesuaian-penyesuaian, sesuai dengan kondisi. Mungkin demokrasi ala Mesir (kalau Mesir itu sebuah demokrasi) itu belum tentu cocok dengan Indonesia karena persoalan-persoalan lingkungan geografis yang mempengaruhi lingkungan kultural itu mengakibatkan perbedaan penampilan/refleksi budaya.

Dalam sejarah, Dinasti Abbasiyah menguasai daerah-daerah. Apakah politik mereka sama?

Bagaimana dengan gagasan negara-bangsa (nation-state) yang kemudian merebak?

Negara bangsa itu ditolak juga oleh Maududi. Karena, nation-state itu membagi-bagi kaum muslimin atas dasar solidaritas suku, bangsa, bahasa, tanah air, geografis, dan pengalaman sejarah. Jadi loyalitasnya ke sana. Nah, Maududi menolak hal itu karena loyalitas muslim itu harus pada Islam. Oleh karena itu, loyalitas itu tidak pada tali darah, kesukuan, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Loyalitas itu hanya berdasar agama. Itu yang menyatukan ummat Islam. Bukan karena sama-sama orang Indonesia dan bicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu implikasinya dalam politik bagi Maududi adalah konsep *ukhuwwah Islamiyyah* yang diterjemahkan dalam konsep Pan-Islamisme.

Berarti sama dengan Jamaluddin al-Afghani?

Ya. Pan-Islamisme dalam kelembagaan mengambil bentuk kekhalifahan. Ummat Islam itu harus bersatu di tingkat internasional dalam kekuasaan kelembagaan khilafah.

Apakah nation-state itu termasuk paham modernisme?

Gagasan nation-state itu merupakan konsekuensi dari konsep-konsep pemikiran politik Barat.

Apakah hal itu langsung diterima?

Tidak langsung diterima, tetapi melalui pengumpulan pemikiran diantaranya Afghani menolak juga secara implisit nation-state. Karena nation-state itu berdasar loyalitas kesukuan, bahasa, budaya itu ditolak oleh Afghani kemudian belakangan Maududi. Karena itu dianggap membelah-belah ummat Islam. Itulah yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme itu menimbulkan negara-bangsa.

Bagaimana dengan fundamentalisme?

Fundamentalisme dalam masa modern itu muncul sebagai reaksi terhadap kelompok modernisme Islam yang dianggap telah mengorbankan Islam untuk Barat. Kemudian merupakan reaksi terhadap Barat sendiri yang dipandang terus-terusan mengancam Islam.

Kalau nasionalisme muslim itu telah terbukti keberadaannya dalam sejarah, kira-kira fundamentalisme itu bagaimana? kalau kemudian dievaluasi.

Fundamentalisme itu macam-macam juga. Ada fundamentalisme yang sebetulnya bisa tidak terlalu radikal, tapi ada juga yang radikal. Kemunculan fundamentalisme itu sendiri dipengaruhi banyak sebab. Dalam konteks sebuah negara kaum muslimin sangat tergantung dari kelembagaan politik yang ada, *nature* (sifat) regim yang ada itu mempengaruhi bagaimana bentuk fundamentalisme muncul. Kalau ideologi sebuah nation-state itu sekuler, maka kemungkinan fundamentalisme itu semakin luas. Pendorong/motivasi untuk mengubah sistem sekuler. Yang kedua, kalau rejimnya repressif, itu akan mendorong terjadinya kristalisasi fundamentalisme yang radikal.

Bagaimana dengan massa fundamentalisme yang berevolusi?

Itu tergantung dari dua hal tadi. Kalau ideologinya semakin sekuler, maka reaksi balik dari fundamentalisme misalnya semula mungkin hanya kecil tapi lalu menjadi besar, seperti di Iran misalnya. Syah Iran itu sangat sekuler dan pro-Barat. Hal itu mendorong bagi kaum yang mula-mula hanya Islamis yang kemudian jadi radikal akhirnya menjadi kelompok fundamentalis.

Sejauh ini yang berhasil seperti itu mungkin hanya Iran?

Mungkin hanya Iran.

Di dunia Sunni, apakah juga muncul fundamentalis yang radikal?

Kita sebetulnya harus hati-hati memakai istilah *fundamentalis*. Kita tahu bahwa kaum muslimin itu sendiri keberatan dengan istilah fundamentalis. Mereka menyebutnya sebagai *ushuliyun* (kembali pada *ushul*/fundamen-fundamen Islam). Tapi kemudian persepsi umum fundamentalis itu identik dengan radikalisme. Kasus di Sudan mungkin berbeda dengan di Iran yang fundamentalisnya lebih radikal. Kalau di Sudan saya lihat belum sampai ke tingkat itu. Karena rejim Sudan sendiri sebetulnya tidak repressif seperti yang ada di Iran.

Bahkan penguasa-penguasa Sudan beberapa tahun terakhir ini bekerja sama dan merekrut orang-orang yang katakanlah orang-orang Islamis atau *Ushuliyun* seperti Hassan al-Turabi dan Shadiq al-Mahdi yang oleh Barat disebut dari kalangan fundamentalis. Tetapi menurut saya mereka bukanlah fundamentalis tetapi lebih mungkin disebut sebagai kelompok Islamis.

Bagaimana halnya dengan Indonesia?

Saya kira tidak. Karena pertama, ideologi politik di Indonesia bukanlah ideologi yang anti-Islam atau ideologi yang bermusuhan (*hostile*) dengan Islam. Pancasila itu jika dilihat dari perspektif Islam tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Semuanya dapat ditemukan dasar-

..., loyalitas itu tidak pada tali darah, kesukuan, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Loyalitas itu hanya berdasar agama. Itu yang menyatukan ummat Islam. Bukan karena sama-sama orang Indonesia dan bicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu implikasinya dalam politik bagi Maududi adalah konsep *ukhuwwah Islamiyyah* yang diterjemahkan dalam konsep Pan-Islamisme.

Pada tingkat yang supra-lokal atau supra-regional tentu berporos pada kekhalifahan. Tapi pada tingkat lokal itu terjadi keragaman. Kekhalifahan Abbasiyah itu kan luas sekali termasuk Irak, Mesir, dsb. Apalagi pada masa-masa kesultanan-kesultanan kecil yang mengaku masih berada di bawah kekhalifahan Abbasiyah seperti Muwahhidin, Murabbitin, dsb. yang merupakan kekuasaan-kekuasaan lokal. Politik di masing-masing wilayah itu berbeda atau beragam. Dinasti Abbasiyah itu diatas semuanya yang dapat disebut sebagai kekuasaan politik supra-lokal.

Dari dulu sampai sekarang berarti tidak ada konsep final mengenai politik Islam?

Tidak ada. Yang jelas harus bertitik tolak pada prinsip bahwa yang ditekankan itu syura. Nah, bagaimana syura itu? Itu masih harus dirumuskan. Bisa dibayangkan akan menimbulkan berbagai macam perbedaan. Syura dalam masyarakat Pakistan akan lain dengan Indonesia. Tapi intinya itu syura. Apakah dalam bentuk demokrasi? Kalau demokrasinya dipandang berbentuk perwakilan (*representasi*), representasinya itu dalam bentuk apa? Apakah melalui *ahlu al-halli wa al-'aqdi*? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah *adil*, apakah *adil* harus satu sama dengan satu? satu dibagi dua itu kalau ada 2:2 itu harus satu. Dalam hitungan politik itu mungkin tidak harus selalu begitu. Mungkin lebih berdasarkan proporsionalitas. Misalnya, jadi dua prinsip pokok dalam Islam dan banyak lagi.

Politik Islam itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi berapa bagian?

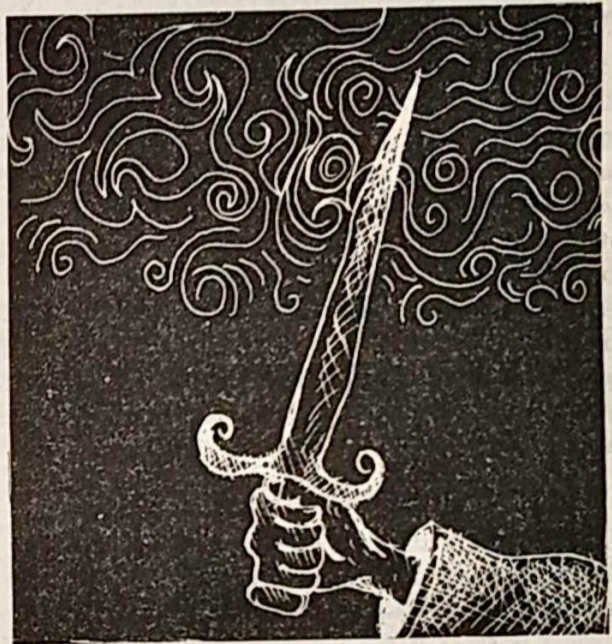
Kalau yang historis pertama-tama adalah zaman Nabi Saw. dan Khulafa al-Rasyidin. Sistem politiknya bersifat demokratis dimana proses-proses politik yang terjadi dan kelembagaan politik yang ada itu berpusat pada prinsip-prinsip musyawarah misalnya soal suksesi, dan sebagainya.

Nabi kan selalu mempunyai otoritas?

Tentu Nabi sebagai seorang rasul, tetapi Nabi juga sebagai pemimpin politik. Yang jelas, masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin itu sistem politiknya berpijak pada prinsip *syura*. Tapi setelah Dinasti Umayyah, tidak lagi seperti. Karena sejak itu kepemimpinan politik lebih ditekankan pada dinasti/monarki, yaitu pada garis keturunan. Tetapi, karena Dinasti Umayyah ini didominasi oleh orang Arab dan merupakan dinasti yang pertama maka sikap demokratis itu masih ada. Seorang rakyat misalnya tidak susah menemui khalifah atau penguasa. Karena kebudayaan Arab itu bersifat bersahaja dan egaliter. Berbeda dengan pada Dinasti Abbasiyah, penguasa yang ada itu semakin absolutis. Sultan atau penguasa memakai gelar-gelar yang membuat mereka semakin jauh dari rakyat dan mempunyai istana-istana yang megah.

Apakah sifat kekuasaan ummat Islam seperti itu berlanjut sampai pada kesultanan Turki?

Turki juga seperti itu, walaupun tidak seabsolut Abbasiyah. Karena Turki itu mempunyai kebudayaan *Ghazi* (kebudayaan pejuang) yang relatif sederhana tidak terlalu *sophisticated* atau canggih. Tetapi tetap saja dalam masa-masa belakangan absolutisme Turki Usmani juga muncul.



Kalau kerajaan Syafawi di Iran dan Mughal di India?

Saya kira absolutisme itu kemudian menjadi ciri yang sangat menonjol sejak Abbasiyah di seluruh dunia Islam sampai datangnya *fenetasi* (pengaruh) Barat, ketika Barat mulai mengembangkan konsep-konsep patriotisme, konsep konstitusionalisme, dsb. Itu kemudian menyebabkan absolutisme penguasa itu digugat dan dipersoalkan. Di Indonesia sendiri, absolutisme itu awalnya mendominasi juga di tiap kerajaan Islam. Hal itu dikenal dengan adanya sebutan *Daulat Tuanku*, raja atau penguasa dianggap sebagai Daulat Tuhan. Rakyat tidak punya kedaulatan sama sekali. Rakyat itu harus mematuhi penguasa dan tidak boleh durhaka. *Durhaka* itu satu konsep kunci pula pada saat itu. Misalnya rajanya itu tidak adil, rakyat tidak boleh berontak, tidak boleh durhaka. Sebab kalau penguasa itu zalim dan *despotik* bukan rakyat yang harus membalas. Yang mengoreksinya itu Tuhan sendiri. Tapi kemudian, awal abad ke-20 terjadi perubahan di Nusantara ini. Yang ada itu bukan hanya daulat Sultan tetapi juga *Daulat Rakyat*, bahwa rakyat punya kedaulatan.

Apakah hal itu sama di seluruh dunia muslim?

Bisa disebut hampir semua sama.

Apakah hal itu merupakan pengaruh dari modernisasi?

Ya, itu terjadi ketika dunia modern muncul. Baru kemudian ada arus balik ketika sebagian pemikir muslim melihat bahwa perkembangan politik Islam itu kelihatannya begitu dipengaruhi Barat, maka muncul reaksi seperti yang dilakukan oleh Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi menolak demokrasi. Ia mungkin tidak menolak *syura*, tapi ia menolak demokrasi ala Barat. Karena dianggap demokrasi ala Barat itu pada intinya bertitik tolak dari sistem representasi dimana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ini tidak bisa diterima oleh Abul A'la al-Maududi. Karena, dengan memberikan kedaulatan pada rakyat berarti mengorbankan kedaulatan Tuhan.

dasar pembedannya dalam Islam. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan dapat dipandang sebagai Tauhid, dan seterusnya. Pokoknya kelima sila Pancasila itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Islam.

Oleh karena itu, tidak ada dorongan yang terlalu kuat bagi kaum muslimin pada umumnya untuk menggantinya dengan ideologi yang lain. Karena itu dipandang cukup representatif atau tidak bertentangan dengan Islam. Lain kalau misalnya di Irak atau di Syria. Ideologi negaranya ideologi *ba'athisme* (sosialisme). Sosialisme yang pendulumnya bisa mengarah pada sosialisme saja atau sosialisme komunisme. Itu bagi banyak orang bertentangan dengan Islam. Maka dorongan untuk mengubahnya itu sewaktu-waktu selalu ada, menjadi satu hal yang laten.

Sedangkan di Indonesia Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sehingga sebagian besar (mayoritas) umat Islam Indonesia tidak berpikir untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat (*nature*) penguasa Indonesia itu boleh dikatakan tidak repressif sebagaimana banyak rejim-rejim penguasa di Timur Tengah.

Jadi di setiap daerah itu bisa terdapat perbedaan-perbedaan itu sampai sekarang?

Ya. Karena perbedaan-perbedaan geografis, kultural, perbedaan komposisi sejarahnya itu mempengaruhi. Di Pakistan misalnya, konflik politik itu luar biasa besar karena konflik itu muncul dari berbagai aliran. Jadi ada konflik etnis misalnya suku Punjab dengan suku Pushtun. Itu dari garis kesukuan. Ada lagi dari garis keagamaan: orang Syi'ah dan orang Sunni. Orang Sunni mayoritas tetapi orang Syi'ah berada pada posisi-posisi strategis. Kemudian ada lagi garis antara tuan tanah (*landlords*) dengan massa rakyat. Pakistan itu sejak dulu secara tradisional dikuasai oleh tuan tanah. Mereka inilah yang mempengaruhi proses-proses politik. Itu menimbulkan konflik dengan rakyat jelata. Kemudian ada lagi garis pertentangan antara *Muhajirin* (yang hijrah dari India) dengan orang muslim yang asli Pakistan.

Itu dapat dilihat ada *Muhajir Qaumi Movement* yang radikal itu karena ditindas oleh penguasa. Jadi kompleks sekali. Nah di

Indonesia garis-garis seperti itu tidak ada. Mayoritas muslim di Indonesia adalah Sunni. Syi'ah boleh dikatakan tidak signifikan baik dalam segi kuantitatif maupun kualitatif. Jadi Sunni tidak ada tandingannya, meskipun Sunni di sini ada ragamnya tapi tidak menjadi satu faktor yang tidak terlalu penting. Yang kedua politik kesukuan di sini relatif tidak setajam seperti di Pakistan.

Kita tidak mengenal ada di Indonesia konflik diantara Kaum *Muhajirin* dengan *Anshar* karena memang tidak ada. Semuanya Indonesia asli. Yang biasa dilihat itu kemungkinan munculnya politik kesukuan seperti antara Jawa dan luar-Jawa misalnya. Itu satu potensi konflik yang sering jadi slogan dari kelompok-kelompok separatis seperti di Aceh atau di Irian Jaya. Mereka menganggap bahwa orang-orang Jawa banyak melakukan dominasi di wilayah mereka. Mereka menyebutnya sebagai *Jawanisasi*.

Kemungkinan fundamentalis di Indonesia tidak terlalu bermacam?

Kemungkinan itu ada, tapi kecil sekali. Pertama sariat Islam di Indonesia itu adalah Islam lebih toleran, akomodatif, dialogis itu menguntungkan sehingga kemungkinan perkembangan "fundamentalis Islam" itu menjadi lebih kecil. Tapi, dua faktor tadi yang pokok. Pertama ideologi negara yang tidak anti Islam bahkan sesuai dengan Islam. Yang kedua, penguasa yang tidak repressif. Tentu saja dalam satu kelembagaan politik, sistem politik, dan proses politik itu selalu ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Saya melihat bahwa di Indonesia lebih toleran dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah atau Pakistan dalam menghadapi kelompok yang tidak sejalan (oposisi) terhadap penguasa.

Input-input untuk Islamisasi itu tetap ada harapan?

Islamisasi atau santrinisasi itu proses yang kontinue. Jadi moment-moment tertentu itu mungkin momentum bagi santrinisasi masyarakat muslim Indonesia. Saya lebih suka menggunakan istilah "santrinisasi" daripada Islamisasi. Karena yang terjadi itu peningkatan (*intensifikasi*) dari keislaman kaum muslim di Indonesia dari berbagai aspeknya. Nah, intensifikasi ini bisa dilihat gejalanya dalam berbagai macam bidang.

Harapan untuk umat Islam Indonesia?

Sekarang ini perkembangan Islam di Indonesia cukup mengembirakan tapi kita melihat pula itu masih pada tingkat *antusiasme* atau kesemarakan keagamaan. Gejalanya itu diantaranya adalah banyaknya orang naik haji, pengajian-pengajian di hotel-hotel, rumah ibadah penuh sesak, tahlilan nasional, dan sebagainya.

Tapi tidak cukup dengan itu. Kaum muslimin Indonesia itu harus meningkatkan kualitas keagamaan. Karena, jika dilihat, pada satu pihak antusiasme kesemarakan keagamaan itu meningkat di Indonesia tapi pada saat yang sama korupsi masih merajalela. Seolah-olah ada kesenjangan (*gap*) antara kesemarakan keagamaan dengan perilaku sosial umat Islam. Kalau Indonesia dikatakan sebagai negara paling korup di dunia, maka saya kira sebagian besar pelakunya adalah umat Islam, karena umat Islamlah yang mayoritas.

□ M. Taufiq R

Kita tidak mengenal ada di Indonesia konflik diantara Kaum *Muhajirin* dengan *Anshar* karena memang tidak ada. Semuanya Indonesia asli. Yang biasa dilihat itu kemungkinan munculnya politik kesukuan seperti antara Jawa dan luar-Jawa misalnya. Itu satu potensi konflik yang sering jadi slogan dari kelompok-kelompok separatis seperti di Aceh atau di Irian Jaya. Mereka menganggap bahwa orang-orang Jawa banyak melakukan dominasi di wilayah mereka. Mereka menyebutnya sebagai *Jawanisasi*.